



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKMA VIOLETTA**
2. Jabatan : **ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**
3. NHK : **470491**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 19.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1396 m2/600 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/115 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Bangunan Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 14037 m2/600 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 2916 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 388.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, NISSAN ELEGRAND 2010 MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA ACCORD 2013 SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 88.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 405.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 5.549.521.622**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	26.081.521.622
III. HUTANG	Rp.	3.936.181.890
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.145.339.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.